RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 81/PUU-XVIII/2020

“Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Hukum”

I. PEMOHON

1. Arnoldus Belau (Pemohon I)
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dalam hal ini diwakili oleh Abdul Manan selaku Ketua Umum dan Revolusi Riza Zulverdi selaku Sekretaris Jenderal - (Pemohon II)

Kuasa Hukum:

Ahmad Fathanah Haris, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:
“Dalam suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
6. Bahwa oleh karena objek permohonan adalah mengenai uji materi Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.

2. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005, para Pemohon telah memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau bersifat potensial atas berlakunya objek permohonan sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, dimana kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
 - c. hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, dimana kerugian tersebut bersifat potensial;
 - d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, wartawan yang telah lulus sertifikasi, sebagai pihak yang ikut serta berkontribusi mengisi konten berupa artikel pemberitaan situasi Papua dan Papua Barat pada situs yang bernama suarapapua.com.
4. Bahwa Pemohon I mengalami kerugian dengan berlakunya norma Pasal *a quo* yang menjadi dasar Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutus akses elektronik menuju situs suarapapua.com., melalui surat Nomor: B-687/KOMINFO/DJAI/HK.02.01/11/2016 tertanggal 21 November 2016 bahwa konten dalam situs suarapapua.com bermuatan negatif, namun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pihak Kemenkominfo yang dikualifikasikan sebagai konten negatif. Pihak Kemenkominfo menjelaskan dasar pemutusan akses berdasarkan pada Pasal 40 ayat (2) UU 19/2016, meskipun demikian rumusan Pasal *a quo* tidak bisa dipisahkan dari norma Pasal 40 ayat (2) UU 19/2016.
5. Bahwa akibat pemutusan akses elektronik tersebut, Pemohon I tidak dapat membuat dan mengunggah konten berupa artikel pemberitaan tentang situasi Papua dan Papua Barat. Ketentuan norma Pasal *a quo* yang menjadi dasar pemutusan akses elektronik kepada situs suarapapua.com sebagai wadah informasi yang dikelola oleh Pemohon I merugikan hak konstitusional Pemohon I yaitu hak atas informasi sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945;

6. Bahwa Pemohon II adalah merupakan Pemohon badan hukum privat, yang bertujuan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dengan visi yakni terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan misi salah satunya memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
7. Bahwa Pemohon II berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena berlaku norma Pasal *a quo* membuat Pemohon II sewaktu-waktu dapat kehilangan hak-hak konstitusionalnya untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan norma Pasal *a quo* membuat Pemerintah secara sepihak sewaktu-waktu dapat memutus akses elektronik kepada situs milik Pemohon II dengan dalih situs tersebut bermuatan konten yang melanggar hukum.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan Pasal *a quo* menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dirugikan dan menyebabkan hak konstitusional Pemohon II berpotensi dirugikan.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian materiil UU 19/2016

1. Pasal 40 ayat (2b)

Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

B. NORMA UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa norma Pasal *a quo* secara nyata telah melanggar hak konstitusional para Pemohon khususnya jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa kewenangan Pemerintah yang tidak didahului dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses terhadap sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang, terbukti dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I. Kewenangan Pemerintah dalam norma Pasal *a quo* menutup ruang tersedianya mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Bahwa kewenangan Pemerintah melakukan pemutusan akses baik secara sendiri maupun melalui penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam norma Pasal *a quo* merupakan sarana dalam memberikan kekuasaan yang sangat besar dan tanpa kontrol judisial (*judicial scrutiny*) kepada Pemerintah sebagai bagian dari eksekutif, sehingga tidak ada celah untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan *checks and balance* dan meminta pertanggungjawaban kepada Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses.
4. Bahwa jika melihat praktik pengaturan konten internet di berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Australia, dan Inggris, mereka berfokus pada kategorisasi tentang konten yang baik dan buruk, penindakannya, serta lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi konten. Masing-masing

negara memiliki pengaturan sendiri-sendiri, disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya.

5. Bahwa di Indonesia, selain tidak memiliki otoritas independen yang bertugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan konten internet, Pemerintah juga tidak memiliki kerangka hukum yang jelas khususnya dalam menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, dalam hal ini pemilih, pengunggah/pembuat/pengelola informasi dan/atau dokumen elektronik yang diputus aksesnya oleh Pemerintah untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang.
6. Bahwa kewenangan pemerintah untuk menafsirkan informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan konten melanggar hukum secara sepihak dan tanpa didahului dengan adanya KTUN sesungguhnya memberikan sebuah kekuasaan kepada Pemerintah untuk mengontrol informasi dan/atau dokumen elektronik apa saja yang boleh dan tidak boleh tersebar secara publik. Kewenangan ini tentunya akan berpotensi adanya tindakan *conflict of interest* ketika sebuah informasi tersebut ditujukan untuk mengkritik Pemerintah itu sendiri. Penyampaian informasi akan menjadi terhambat dan masyarakat serta publik akan kehilangan haknya mendapatkan informasi dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi melakukan pengawasan kepada Pemerintah.
7. Bahwa peran para Pemohon dan media kritis lainnya sebagai “*public watchdog*” untuk menyampaikan buah pikir berupa kritiknya kepada Pemerintah akan hilang apabila kewenangan pemerintah dalam norma Pasal *a quo* masih berlaku. Hilangnya peran “*public watchdog*” akibat dari ketentuan dalam norma Pasal *a quo* tentu akan sangat berbahaya dalam kehidupan negara hukum dan demokrasi.
8. Bahwa para Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa hak konstitusional tidaklah bersifat sebebaskan-bebasnya, melainkan ada batasan. Batasan ini berfungsi sebagai jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

9. Bahwa pembatasan hak asasi salah manusia satunya hak atas informasi dan berbagai hak asasi lainnya sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa ditafsirkan hanya sebatas pada untuk melindungi kebebasan orang lain saja, namun juga harus dilihat lebih dalam dengan perspektif keadilan, dalam hal ini pelaksanaan kewenangan berdasarkan mekanisme *due process of law*. Hilangnya peran publik dan kontrol judicial dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam Pasal *a quo* adalah tidak sesuai dengan mekanisme *due process of law*.
10. Bahwa kewenangan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam norma Pasal *a quo* juga merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas informasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi.
11. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal *a quo* tidak dirumuskan dengan konstruksi hukum yang jelas dan tegas sehingga melahirkan adanya pemblokiran/penapisan yang tidak sah dan merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku warga negara.
12. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tidak disertai dengan adanya ruang pengaduan, komplain untuk pengujian, serta pemulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung atas pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang, dalam hal ini pemilih, pengunggah/pembuat/pengelola informasi dan/atau dokumen elektronik termasuk para Pemohon.
13. Bahwa dengan demikian kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam norma Pasal *a quo* sangatlah mencederai salah satu pilar penting dari prinsip negara hukum yaitu perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).